JAWA TENGAH

Kemelut di PWI Pusat Diharapkan Segera Berakhir

SEMARANG (KR)- Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS berharap kemelut di PWI Pusat segera berakhir. Jika polemik organisasi yang dipicu oleh persoalan dana UKW dari BUMN itu berkembang hingga berjilid-jilid, dikhawatirkan akan mempengaruhi kewibawaan PWI. Amir Mahchmud mengatakan hal itu saat memberikan sambutan pembukaan Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) oleh PWI Pusat di Semarang, Selasa (25/6).

Menurut Amir, lazim sebuah dinamika terjadi dalam organisasi. Yang tak lazim adalah adanya upaya dari mereka-mereka yang menginginkan agar persoalan di PWI Pusat dibuat berlarut-larut, PWI Jateng berharap agar PWI Pusat di bawah kepemimpinan Hendry Ch Bangun melalui forum SJI menegaskan komitmennya untuk mengakhiri polemik, karena PWI merupakan rumah besar bersama para wartawan yang harus dijaga marwah dan kehormatanya. PWI Jateng ingin segala hal yang berkaitan dengan marwah dan kehormatan PWI bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan persaudaraan.

"PWI Jateng menekankan hati dan rasa dalam menyelesaikan persoalan. Harapan kami, PWI Pusat juga melaksanakan langkah yang sama," tutur Amir Machmud. Sebelumnya PWI Jateng juga sudh menyampaikan pernyataan sikap yang berisi lima butir sikap, diantaranya mendorong pemulihan marwah organisasi yang bergantung pada arah sikap Pengurus PWI Pusat dan Dewan Kehormatan PWI Pusat. Tujuannya untuk menyelamatkan organisasi profesi ini ke posisi eksistensial.

Selain itu, PWI Jateng juga mendesak para senior di pusat agar focus pada penyelesaian kemelut organisasi dengan mendengarkan suara-suara dari daerah/ provinsi, serta minta para senior di Pusat melepaskan diri dari segala ego dan kepentingan untuk menyelamatkan martabat organisasi.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun saat membuka SJI memastikan, akhir Juni ini persoalan di tubuh PWI akan tuntas. Dia menyebut, apa yang dialami PWI Pusat sebagai ujian yang sudah digariskan oleh Tuhan. "PWI itu dekat dengan Pemerintah, tapi bukan pemerintah. PWI itu ibarat pohon besar, semakin besar maka semakin kencang angin yang meniupnya. InsyaAllah bulan Juni sudah selesai. Kami sudah koordinasi dengan Pak Sasongko (Ketua Dewan Kehormatan PWI Sasongko Tedjo)," ujar Hendry. (Bdi)-f



Pengurus PWI Pusat, PWI Jateng dan peserta SJI.

UKSW Gelar Inovasi Harmoni Nusantara

SALATIGA (KR)- Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga menggelar Inovasi Harmoni Nusantara (GIHN) 2024 di kampus Jalan Diponegoro Salatiga, Selasa (25/6) sampai Kamis (27/6). GIHN ini bertema Menumbuhkembangkan Kepemimpinan yang Kreatif, Inovatif, dan Berdaya Dampak dan dibuka oleh Rektor UKSW, Intiyas Utami dan diikuti sejumlah perguruan tinggi di Jateng. Pembukaan GIHN ditandai dengan pemukulan gong oleh Rektor Intiyas yang diikuti penampilan mahasiswa Arttulistiwa Dance yang membawakan tarian ìHarmoni Indonesiaî dan Mutiara dari Timur Choir. Intiyas Utami mengatakan tantangan signifikan dalam menjadikan UKSW sebagai pionir dalam inovasi pendidikan. Saat ini UKSW menggelontorkan dana riset inovasi mencapai Rp 5 miliar.

Melalui transformasi pembelajaran di UKSW yang melibatkan kurikulum Talenta Merdeka dan penggantian skripsi dengan Talenta Unggul, serta kolaborasi erat dengan berbagai institusi lain, Intiyas mengajak perguruan tinggi lainnya, FORKOPIMDA serta mitra untuk berkolaborasi dan menekankan pentingnya memilih daerahdaerah yang memerlukan perhatian dalam karya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Puluhan stand berjajar dihiasi dengan aksesoris etnis yang mencerminkan kekayaan budaya nusantara, ciri khas Kampus Indonesia Mini, UKSW Salatiga. Setidaknya 100 stand menggugah rasa ingin tahu, menampilkan berbaqai inovasi, mulai dari teknologi mutakhir hingga produk kreatif dari UKSW dan universitas lainnya.

BPJS Kesehatan Fokus Kembangkan Pelayanan

SOLO (KR) - Setelah Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan 10 tahun, kini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lebih fokus mengembangkan pelayanan. Ini dilakukan agar masyarakat semakin merasakan manfaatnya dalam program JKN. "Jadi sekarang kami fokus pada peningkatan layanan supaya masyarakat semakin merasakan manfaatnya program JKN," kata Debbie Nianta Musigiasari, Kepala BPJS Kesehatan Solo saat menggelar gathering media, Selasa (25/6).

Banyak hal yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan. Diantaranya menambah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan, Asri Wulandari mengatakan peningkatkan layanan yang ditempuh dengan berbagai inovasi. Seperti menyediakan antrean online. Selain itu, yang juga membuat e-contract yaitu bentuk perianjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang dibuat melalui sistem elektronik. "Langkah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak dan mendukung efisiensi proses bisnis."

Selain itu juga inovasi melalui telekonsultasi sebagai upaya meningkatkan akses peserta terhadap layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Peserta dapat melakukan konsultasi kepada dokter melalui aplikasi JKN Mobile. Sementara BPJS Kesehatan juga meminimalisasi jumlah aduan yang terkait pelayanan peserta JKN. Ini dilakukan dengan memudahkan dalam mengisi kesan pelayanan serta disiapkan pemberian rating. Dengan cara ini faskes akan selalu berbenah disamping BPJS juga terus melakukan evaluasi.

Di Solo jumlah aduan mengenai sikap petugas pendaftaran yang tidak ramah ada sebanyak 31 aduan, sedangkan sikap tenaga kesehatan tidak ramah ada 29 aduan. (Qom)-f

Komitmen Selesaikan Dampak Krisis Iklim

BANYUMAS (KR) -Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana berkomitmen untuk menyelesaikan dampak krisis iklim dan masalah lingkungan hidup di Jawa Tengah. Untuk itu, Pemprov Jawa Tengah melakukan langkah-langkah penyelesaian krisis iklim dengan caracara inovatif dan mengedepankan prinsip keadilan. Nana Sudjana menyampaikan hal itu saat menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Jatengh di Kebun Raya Baturraden, Kabupaten Banyumas, Selasa (25/6).

Selama periode Januari sampai pertengahan Juni 2024, di Jateng sudah terjadi 192 kali kasus bencana hidrometeorologi. Hal ini sebagai dampak dari perubahan iklim global dan

cuaca ekstrem. Langkahlamngkah yang harus dilakukan Pemprov Jawa Tengah dengan melakukan reboisasi pada hutan dan lahan kritis di wilayahnya. Selain itu juga program pencegahan deforestasi dan perlindungan kawasan yang memiliki ekosistem yang dianggap penting.

Nana mengatakan, kawasan Kebun Raya Baturraden merupakan salah satu contoh kawasan hutan dan ekosistem alam yang masih terjaga. Pohon-pohon besar masih banyak tumbuh sehingga serapan dan penahan air hujan masih bagus. Menurutmua, pelestarian lingkungan di daerah hulu seperti di pegunungan dan perbukitan memang harus dilakukan. Selain itu, harus diimbangi dengan pelestarian daerah hilir



Nana Sudjana melakukan penanaman pohon untuk program penghijauan di Jateng.

seperti penguatan tanggul, penanganan sedimentasi sungai, dan merawat saluran air.

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim juga dilakukan di wilayah pesisir yang terdampak rob seperti di Kota Semarang, dengan pembuatan tanggul yang kini sudah terealisai sekitar 3,5 km. "Kami terus koordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini PUPR yang sudah membuat tanggul-tanggul untuk menahan atau untuk menanggulangi rob, khususnya di Semarang," tutur Mama Sudjana.

Selain itu, Pemprov Jateng juga membuat sumur

resapan dan kegiatan konservasi lainnya. Harapannya, hutan dan lingkungan tetap terjaga dengan baik. Untuk itu Gubernur minta kepada masyarakat agar menanam pohon di sekitar lingkungan yang akan dibimbing oleh dinas lingkungan hidup provinsi maupun kabupaten/kota. Secara umum, Nana mengatakan, kondisi lingkungan di Jateng masih baik. Hanya saja harus benar-benar diperhatikan dan diwaspadai, karena masih ada oknum melakukan kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Untuk itu Pemprov Jawa Tengah akan terus kolaborasi dan koordinasi dengan Pemda, TNI-Polri, pegiat lingkungan, maupun masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. (Bdi)-f

LINDUNGI KESEHATAN IBU DAN ANAK

BKKBN Ingatkan Pentingnya KB Pascapersalinan

SEMARANG (**KR**) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berupaya setiap ibu pascapersalinan sebelum pulang dari fasilitas kesehatan sudah di pasang kontrasepsi. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes, dalam kegiatan Apresiasi KB Pasca Persalinan 'ASIK KBPP-Bidan', Selasa (25/6).

"BKKBN terus berupaya dan berharap, Ibu setelah melahirkan sebelum pulang dari fasilitas kesehatan atau rumah bersalin berkenan untuk dipasang alat kontrasepsi, dengan KB pascapersalinan (KB-PP) memberikan jeda yang cukup antar kehamilan. Sehingga kondisi kesehatan ibu bisa pulih sepenuhnya dan bayi mendapatkan nutrisi yang cukup dengan ASI eksklusif," ujarnya.

Menurutnya, saat ini masih banyak ditemui ibu setelah melahirkan menolak dipasang kontrasepsi. Alasan menunggu 40 hari, atau takut dengan mitoskontrasepsi. Padahal bila tidak segera pasang kontrasepsi risikonya bisa terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Berdasarkan laporan hasil pelayanan kontrasepsi tahun 2021 menunjukkan cakupan pelayanan KBPP masih sangat rendah, hanya sebesar 30,23% persen dari total persalinan. Pada 2022 mencapai 18,44% dari total persalinan dan pada tahun 2023 sebesar 49,1%. Capaian tersebut masih jauh dari target KBPP sebesar 70% pada tahun 2024.

"Salah satu kendala utama rendahnya capaian KBPP adalah adanya persepsi negatif terhadap mitos terkait penggunaan KBPP yang dipengaruhi produksi dan KBPP yang mitos

oleh norma-norma budava. nilai-nilai agama, dan stigma sosial. Sehingga sangat diperlukan edukasi yang komprehensif dan mudah diakses oleh pasangan usia subur, ibu hamil dan ibu bersalin," ujar Wahidin.

Menurutnya, bidan dapat menjadi salah satu subjek penting dalam melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KBPP kepada masyarakat. Adapun proporsi bidan saat ini cukup besar, menduduki urutan kedua dari seluruh tenaga kesehatan di Indonesia. "Bidan dapat memainkan peran penting dalam memberikan KIE kesehatan reberkualitas. Juga dalam memberikan pemahaman yang komprehensif serta mengubah persepsi Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, dan ibu pascasalin," urainya. Bidan Yuyun Beti

Budiersih yang juga penggiat sosial media Tiktok @bidan ganteng, saat menjadi narasumber dalam Talkshow Kespro & KB Pascapersalinan Pengumuman Apresiasi KB Pasca Persalinan 'ASIK KBPP-Bidan' mengungkapkan, bidan dapat menjadi ujung tombak dalam membantu BKKBN meningkatkan capaian pelayanan KBPP.

Melalui konten di Tiktok yang telah ditekuni selama lima tahun, bidan Yuvun berharap mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Ia juga berusaha menjawab mitosberkembang di masyarakat, misalnya terkait penggunaan kontrasepsi. "Saya selalu berupaya dalam berkonten memasukan unsur humor sehingga tidak melulu hanya tentang edukasi saja. Selain itu saya juga membuka konsultasi melalui grup whatsapp," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, Drs Sukaryo Teguh Santoso MPd mengungkapkan, kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan berbagai platform sosial media sebagai sarana KIE. Bidan Yuyun bisa menjadi salah satu contoh yang keren dan bisa diikuti. Menurut Sukaryo Teguh, dari tahun 2023 hingga saat ini capaian peserta KB modern bisa mencapai angka di atas 60 persen. "Ini juga salah satu hasil dari kiner-

Didorong Akselerasi Cakupan Kepesertaan JKN

Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno mendorong pemerintah kabu-

SEMARANG (KR) -

paten/kota di wilayahnya untuk mengakselerasi cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Jaminan kesehatan itu sangat penting, karena sakit datangnya tidak bisa diprediksi. Sumarno mengatakan hal itu di selasela acara Apresiasi Kepatuhan Pembayaran Iuran Program JKN 2023 di Semarang, Selasa (25/6). Dengan mempunyai jaminan kesehatan, maka ketika sakit datang, kita sudah tidak khawatir soal biaya.

Menurut Sumarno, program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan menjadi salah satu upaya penanganan kemiskinan. Jaminan kesehatan merupakan layanan dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat. Penyelenggaraan program JKN tidak hanya tanggung jawab pemerin-

tah, namun juga perlu ada kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta. Deputi Direksi Wilayah IV BPJS Kesehatan Mulyo Wibowo mengapresiasi pemerintah daerah atas kontribusinya dalam penyediaan anggaran dan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan, sehingga membantu pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Menurut Mulyo Wibowo, per 1 Juni 2024, jumlah peserta JKN di Jawa Tengah tercatat sekitar 37 juta jiwa, atau 97,1 persen dari total penduduk sebanyak 38,1 juta jiwa. Presiden RI Joko Widodo juga telah menetapkan target UHC 2024 sebanyak 98 persen. Dengan demikian dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mencapai target cakupan kepesertaan JKN tersebut.

Dukungan Pemda bisa berupa penyediaan anggaran, dukungan regulasi untuk mendorong masyarakat aktif membayar iuran, serta dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Dalam kesempatan itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pengharagaan kepada Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota di Jateng atas kontribusinya dalam mendukung kepatuhan membayar iuran BPJS (Bdi)-f

Atiqoh Ganjar Masuk Survei Bursa Cawagub Jateng

SEMARANG (KR) Atiqoh, istri Ganjar Pranowo disebut masuk survei Cawagub Jateng Kanigoro Network dengan elektabilitas tertinggi 30,4% di atas Taj Yasin Maimoen yang menempati urutan kedua dengan perolehan 22,7%. Survei elektabilitas pada sejumlah tokoh ini dilakukan Kanigoro Network di 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah pada periode 1 sampai 15 Juni 2024.

Pendiri Kanigoro Network Joko Kanigoro mengatakan dalam survei ini pihaknya mengukur elektabilitas 4 nama tokoh yang diprediksi akan maju sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kemudian ada 4 tokoh yang memiliki standar kompetensi dan kelayakan sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah dan terakhir adalah simulasi dua pasang Gubernur dan Wakil Gubernur. Joko Kanigoro menceritakan berdasarkan Top of Mind mengerucut pada 4 figur tokoh yang paling layak sebagai Wakil



Tabel hasil survei Bursa Cawagub Jateng Kanigoro Network.

Gubernur Jawa Tengah.

Setelah istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dan Taj Yasin Maimoen, diurutan ketiga dan seterusnya ada M Yusuf Chudori atau Gus Yusuf dan putri Bambang Wuryanto atau Bambang Patjul yakni Casytha Arriwi Kathmandu. "Sosok Siti Atikoh istri mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode Ganjar Pranowo menempati posisi tertinggi sebesar 30,4% mengalah-

kan Taj Yasin Maimoen yang kini menempati posisi kedua sebesar 22,7%, diurutan posisi ketiga diduduki oleh M. Yusuf Chudlori sebesar 17,1%, sementara Casytha Arriwi Kathmandu putri dari tokoh PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menduduki posisi terakhir sebesar 13,2%, calon lain sebesar 9,4% dan sebesar 7,2% responden menjawab tidak tahu," urai Joko Kanigoro.

"Efek kepemimpinan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode menjadi faktor yang cukup signifikan terhadap tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Siti Atikoh (istrinya) sebagai Wakil Gubernur mengalahkan Taj Yasin Maimoen meskipun diperiode kedua Taj Yasin menjadi Wakil Gubernur mendampingi Ganjar Pranowo," lanjut Joko Kanigoro.

Joko Kanigoro menilai sosok Taj Yasin yang memiliki background partai politik dari kalangan santri meski punya pengalaman sebagai Wakil Gubernur belum sepenuhnya berhasil menyakinkan publik politik Jawa Tengah jika dihadapkan pada Siti Atikoh yang juga berlatar belakang kaum Nahdliyin. "Faktor ketokohan Ganjar Pranowo yang sangat dominan sebagai Gubernur menjadi salah satu sebab figur Taj Yasin sebagai Wakil Gubernur cenderung tenggelam sehingga publik tidak melihat peran politik Taj Yasin dalam pemerintahan," tegas Joko Kanigoro.

Survey elektabilitas yang dilakukan oleh Kanigoro Network pada tanggal 01 -15 Juni 2024 di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah merupakan survey tahap kedua yang sebelumnya dilakukan di bulan Maret 2024. Simulasi survey difokuskan pada 8 tokoh yang paling berkapasitas sebagai Calon Gubernur maupun Wakil Gubernur berdasarkan standart kompetensi dan kelayakannya.

Dalam survey kali ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Non Probability Purposive Sampling melalui sampel 2.100 responden terpilih dengan kriteria tokoh (stakeholder) yang dapat mempengaruhi pemilih lainnya (advocacy voters) berdasarkan kemampuan dalam melakukan penilaian kompetensi dan kelayakan tokoh figur Calon Gubernur maupun Wakil Gubernur. (Cha)-f